

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I
STASIUN KARANTINA IKAN
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BATAM TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan I tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya. Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2025. Pada Triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target dan sudah terealisasi 100%.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BKIPM di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Batam, 15 April 2025
Kepala Stasiun KIPM Batam

M. Darwin Syah Putra, S.Pi., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan	11
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	13
BAB II. RENCANA AKSI SKIPM BATAM	
2.1. Rencana Strategis	14
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	18
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	20
3.3. Realisasi Anggaran	46
BAB IV. PENUTUP	
	48
LAMPIRAN.....	
	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKIPM Batam Tahun 2025.....	16
Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SKIPM Batam Tahun 2025	18
Tabel 3 Capaian Kinerja SKIPM Batam Tahun 2025.....	22
Tabel 4. Target dan Realisasi IK 1 pada tahun 2025	23
Tabel 5 Target dan Realisasi IK 2 pada tahun 2025.....	24
Tabel 6. Target dan Realisasi IK 3 pada tahun 2025	25
Tabel 7. Target dan Realisasi IK 4 pada tahun 2025.....	26
Tabel 8 Target dan Realisasi IK 5 pada tahun 2025	26
Tabel 9. Target dan Realisasi IK 6 pada tahun 2025.....	27
Tabel 10. Target dan Realisasi IK 7 pada tahun 2025.....	28
Tabel 11 Target dan Realisasi IK 8 pada tahun 2025	29
Tabel 12. Target dan Realisasi IK 9 pada tahun 2025.....	30
Tabel 13. Target dan Realisasi IK 10 pada tahun 2025	31
Tabel 14 Target dan Realisasi IK 11 pada tahun 2025	32
Tabel 15 Target dan Realisasi IK 12 pada tahun 2025	33
Tabel 16. Target dan Realisasi IK 13 pada tahun 2025	34
Tabel 17. Target dan Realisasi IK 14 pada tahun 2025	36
Tabel 18 Target dan Realisasi IK 15 pada tahun 2025	36
Tabel 19. Target dan Realisasi IK 16 pada tahun 2025	37
Tabel 20. Target dan Realisasi IK 17 pada tahun 2025.....	38
Tabel 21. Target dan Realisasi IK 18 pada tahun 2025.....	39
Tabel 22. Target dan Realisasi IK 19 pada tahun 2025	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2. Peta Strategi BPPPMHKP Tahun 2024 – 2029.....	15
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Batam Tahun 2025	18

IKHTISAR EKSEKUTIF

. Terdapat 14 indikator kinerja di Triwulan I Tahun 2025, dan telah tercapai pemenuhan target sampai dengan Triwulan I. Uraian dan status capaian dari 14 indikator tersebut dapat dilihat pada matriks berikut ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Indeks)	87
		10	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	86
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	85

		12	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	76
		13	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	70
		14	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (Nilai)	88

Unit STASIUN KIPM

Kerja BATAM

Bulan Maret - 2025

Skor Kinerja
113.63

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-1	
						TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	0,00	0,00
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00	100,00
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	99,00	100,00
4	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	angka	Maximize	0,00	0,00
5	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	angka	Maximize	0,00	0,00

6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.1	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	0,00	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	85,00	100,00

12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.7	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP SKIPM Batam	%	Maximize	76,00	100,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.8	Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup SKIPM Batam	Indeks	Maximize	88,00	99,04

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Kinerja keuangan Stasiun KIPM Batam Tahun 2024 melalui program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran triwulan I sebesar Rp.8.226.812.000,- Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam 2024 Triwulan I mencapai Rp. 1.294.319.073,- atau sebesar 15.73%

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Batam mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistim manajemen mutu, serta sebagai otoritas kompeten dalam sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. BPPMHKP Batam juga melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir, Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawain, keuangan dan rumah tangga.

Sampai dengan tahun 2025 struktur organisasi Stasiun KIPM Batam dapat dilihat pada gambarberikut ini:



Gambar 1 STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KIPM BATAM

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Batam dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja (LKj). LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Stasiun KIPM Batam dalam rangka melaksanakan misi Stasiun KIPM Batam dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja Stasiun KIPM Batam. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LKj juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Stasiun KIPM Batam

BKIPM dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil

perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan

pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang di dukung Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis pembangunan perkarantina, keamanan hayati ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan dilihat dari prioritas pembangunan kelautan dan perikanan, sebagai berikut :

- a. Pengawasan terintegrasi di wilayah perbatasan;
- b. Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- c. Daya Saing dan Nilai Tambah Hasil Perikanan

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Dalam rangka menyatukan arah dan mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan optimal, Stasiun KIPM Batam mempunyai visi yang ingin dicapai yaitu “ **Hasil Perikanan Yang Sehat Bermutu, Aman Konsumsi Dan Terpercaya**”.

2.2 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pintu masuk negara dan wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian, dan monitoring;
3. Meningkatkan penerapan praktik baik di seluruh rantai pasok dan kepatuhan terhadap standar mutu hasil kelautan dan perikanan ;

2.3 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Stasiun KIPM Batam, adalah sebagai berikut;

1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar;
3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan;

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam (LKj Stasiun KIPM Batam) Triwulan I tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Batam dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaantugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Batam Tahun 2025. Pada Triwulan I tahun 2025 semua target terealisasi 100%. Stasiun KIPM Batam telah menetapkan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja SKIPM Batam tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini



Gambar 1.2 Peta Strategis SKIPM Batam Tahun 2025

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Batam Tahun 2025

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TARGET 2025
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	99,00
4	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	angka	Maximize	0,00
5	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	angka	Maximize	0,00
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.1	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00

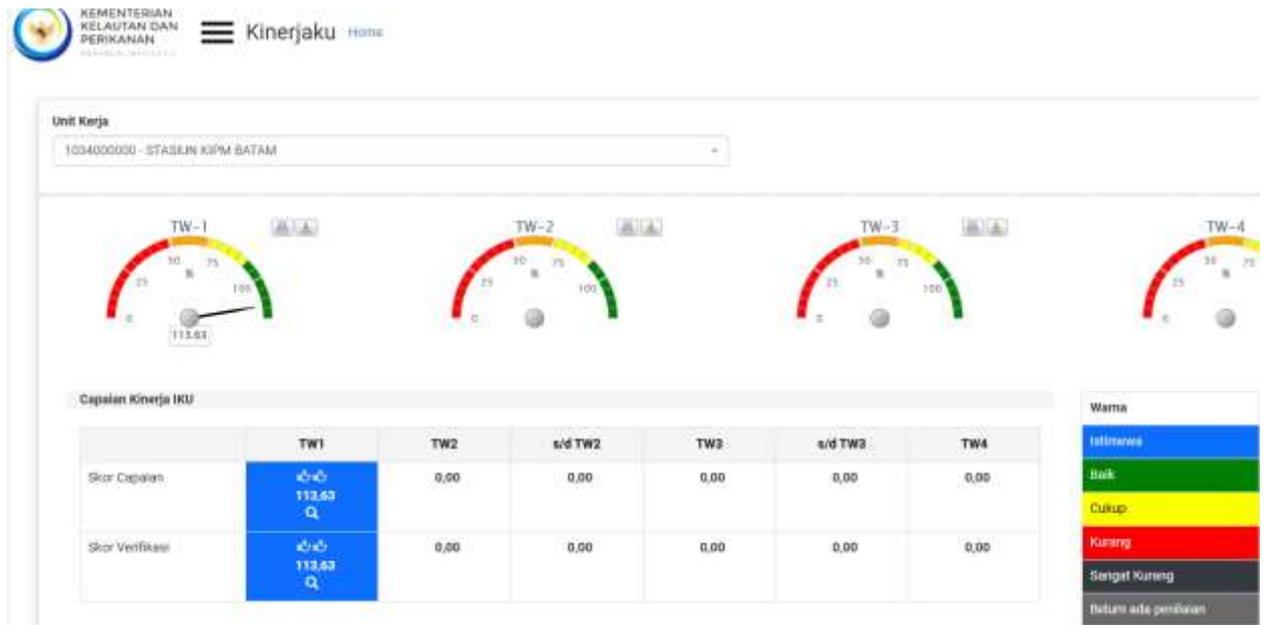
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	85,00
12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.7	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP SKIPM Batam	%	Maximize	76,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.8	Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup SKIPM Batam	Indeks	Maximize	88,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Nilai pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat diakses melalui aplikasi pengelolaan kinerja yaitu www.kinerjaku.kkp.go.id



Berikut ini disampaikan ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Batam tahun 2025 Triwulan I, sebagaimana disajikan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan I Tahun 2025

NO	SASARAN	KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	POLARISASI	TW-1	
						TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	0,00	0,00
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	%	Maximize	70,00	100,00
3	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	IKS.3	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor	%	Maximize	99,00	100,00

			Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)				
4	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.1	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	angka	Maximize	0,00	0,00
5	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	IKS.02.2	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	angka	Maximize	0,00	0,00
6	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.1	Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
7	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.2	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
8	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.3	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	0,00	0,00
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.4	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
10	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
11	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Batam	%	Maximize	85,00	100,00
12	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.7	PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP SKIPM Batam	%	Maximize	76,00	100,00
13	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.8	Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam	Nilai	Maximize	0,00	0,00
14	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	IKS.03.9	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup SKIPM Batam	Indeks	Maximize	88,00	99,04

3.2 Analisis dan Evaluasi

1.1 Kegiatan 1. Karantina Ikan

Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan 1.2.IKU1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan adalah ukuran penting yang menunjukkan sejauh mana produk perikanan memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang ditetapkan, sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan menjaga dan meningkatkan persentase ini, sektor kelautan dan perikanan dapat berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan. Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan. melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Unit Pembenuhan Rakyat dan Unit Pembesaran Rakyat belum faham mengenai aplikasi OSS sehingga berdampak dalam melakukan permohonan sertifikasi dan sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimtek Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan.

Untuk itu diperlukan sosialisasi mengenai sistem aplikasi OSS kepada pengguna jasa dan diadakannya Biimtek CPIB untuk awak kapal perikanan .

Tabel 3 Capaian Target dan Realisasi IKU 1 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2025-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan(%)	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 1 diberikan anggaran sebesar Rp.70.0000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 1 diblokir dalam rangka efisiensi anggaran sehingga kegiatan ini terealisasi menunggu pembukaan blokir .

Data dukung IKU 1

Triwulan I Tahun 2025

A. Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

No	Nama	Alamat	Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	BerlakuSampai	Keterangan
1	LINTAS LAUT SAMUDERA, PT	Executive Industrial Park Blok A3 No. 11, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Riau Archipelago - Indonesia	Frozen Tuna	B	089/PM/HACCP/PB/01/25	24-Jan-25	24-Jan-27	Inspeksi HACCP
2	TUAH BUMI BERKAH, PT	Kawasan Industri Union Blok J Nomor 03, Batu Ampar, Kota Batam, Riau Islands	Dried Seaweed	B	027/PM/HACCP/PK/02/25	4-Feb-25	4-Feb-27	Inspeksi HACCP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (BPQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAM BASED ON HACCP CONCEPT

No. 089/PM/HACCP/PB/01/25

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
Having regard to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fisheries Products

Menerangkan bahwa:
To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. LINTAS LAUT SAMUDERA
Fish Processing Plant

Alamat : Executive Industrial Park Blok A3 No. 11, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Riau Archipelago - Indonesia
Address

Jenis Produk : Frozen Tuna
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Laiting, Cutting (dunnest), Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing
Processing Steps

Peringkat : B
Grade

Tanggal Inspeksi : January 17, 2025
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations.

Dibuatkan di : Jakarta
Issued at

Tanggal : January 21, 2025
Date



IKU2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi : sertifikasi PMMT/HACCP, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten, pelaksanaan inspeksi ketertelusuran (traceability), inspeksi / verifikasi tahunan CPIB di supplier dan kegiatan surveilen konsistensi penerapan HACCP di UPI .

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan diterapkan melalui pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Internasional (Codex Alimentarius), dan standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, SKP dan penerapan CPIB di supplier diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah. Sedangkan untuk Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran dan Surat Keterangan Hasil Surveilen diterbitkan berdasarkan Unit Pengolahan Ikan yang melakukan proses produksi.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Perkembangan penyakit ikan yang dinamis dan berkembang pesatnya lalu lintas komoditi perikanan di pasar internasional menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan dari luar wilayah Republik Indonesia. Hal ini perlu disikapi dengan langkah kongkrit BKIPM dalam menjalankan fungsi pencegahan penyakit ikan. Untuk itu sebagai saran dalam menjawab tantangan ini diantaranya diperlukan program peningkatan wawasan sumber daya manusia sebagai operator untuk terus update dan sarana prasarana pengujian laboratorium dalam menunjang identifikasi pengenalan penyakit baru sehingga bisa mencegah masuknya ke Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyakit ikan merupakan salah satu faktor pembatas optimalisasi produksi perikan di Indonesia. Potensi sumber daya ikan di Indonesia sangat besar dan dapat dioptimalkan secara maksimal untuk mencapai kesejahteraan bangsa oleh sebab itu faktor pembatas produksi dalam hal ini penyakit ikan harus dapat dicegah dan dikendalikan agar tidak masuk dari luar negeri dan menyebar yang kemudaian akan berdampak dan

menimbulkan kerugian sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan peningkatan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana pengujian laboratorium yang mutakhir besar harapan tugas dan fungsi dalam pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit ikan karantina dapat senantiasa terlaksana dengan baik.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 2 diberikan anggaran sebesar Rp.170.000.000 tetapi sebagian anggaran diblokir dalam rangka efisiensi anggaran sehingga pelaksanaannya untuk triwulan I realisasi sebesar Rp.4.010.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 2 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya .

Keberhasilan capaian sasaran strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif mempunyai IKU angka persentase target tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 Capaian Target dan Realisasi IKU 2 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam(%)	0	0	70	100	0	0	0	0	0

Data Dukung IKU 2

B. Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

No	Nama	Alamat	Produk	Grade	No.Sertifikat	Tgl.Terbit	BerlakuSampai	Keterangan
1	PT. Interfood Sukses Jasindo	Kawasan Tunas Industrial Estate Blok 8F Kel. Belian Kec. Batam Kota	Sarden Kaleng	B	35159/21/SKP/KL/I/2025	10-Jan-25	10-Jan-27	SKP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (BPQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 027/PM/HA/C/17/9/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Hasyey ngandi to the Government Regulation No. 47 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fisheries Products

Menyatakan bahwa

To Certify that

Unit Pengolahan Ikan : PT. TUAH BUMI BEKKAH

Fish Processing Plant

Alamat : Kawasan Industri Unisa Blok 1 Nomor 21, Batu Ampar, Kota Batam, Riau Islands

Address

Jenis Produk : Dried Seaweed

Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Preparing, Peeling/Slicing, Storing, Stuffing

Processing Steps

Kategori : B

Rate

Tanggal Inspeksi : January 30, 2025

Date of Inspection



P.: 00037227

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELOMPOK PENGOLAHAN
Certificate of "Group Manufacturing Practices"

No. 351/SP/21/SK/PP/PL/02025

Menyatakan
Having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN/KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN/KP/2019

Menyatakan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan : PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO

Fish Processing Plant

Alamat : Kawasan Tutus Industrial Estate Blok 04, Kai, Batam, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Address : Kepulauan Riau

Jenis Produk : Sardin Kaleng, Mackerel Kaleng

Type of Product(s) : Canned Sardines, Canned Mackerel

Tahapan Pengolahan : Penerimaan, Pengemasan, Penyimpanan, Pemasukan

Processing Steps : Receiving, Handling, Storing, Stuffing

Tingkat : B

Rating

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dari saat memenuhinya persyaratan teknis dan hygiene, atau kurang dari dua tahun apabila terdapat pelanggaran ketentuan tersebut.

This certificate is valid for 2 (two) years and not the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violation.

Dikeluarkan di

Jakarta

Tanggal : 10 Januari 2025

Date : 10 January 2025

Berlaku sampai dengan : 10 Januari 2027

Valid until : 10 January 2027

IKU3. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)

Sebagian besar ekspor ikan dan hasil perikanan Indonesia memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa lebih dari 99% produk perikanan Indonesia yang diekspor diterima di negara tujuan, dengan tingkat penolakan kurang dari 1%. Ini menunjukkan bahwa produk perikanan Indonesia secara umum memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh berbagai negara tujuan ekspor. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektifitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenuhan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Tabel 5 Capaian Target dan Realisasi IKU 3 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam (%)	0	0	99	100	0	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2023	Tidak terdapat IKU ini di tahun 2024	1	100

Data Dukung IKU 3

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Batam
Triwulan I Tahun 2025

Bulan	Jumlah HC yang diterbitkan	Jumlah Penolakan
Januari	175	0
Februari	167	0
Maret	167	0
JUMLAH	509	0

$$X = \frac{A-B}{A} \times 100$$

$$X = \frac{509-0}{509} \times 100 \\ = 100\%$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Kesimpulan: dari data tersebut menunjukkan bahwa Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi syarat Mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Batam triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%

Batam, 31 Maret 2025

Mengetahui,

Kepala SKIPM Batam



Timja Pasca Panen



Dinda Anita Nianiki, S.M.H

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Dikarenakan penerbitan SMKHP dan penggunaan aplikasi SIAP MUTU baru saja dilaksanakan di tahun 2025 sehingga masih butuh diadakan nya sosialisasi ke pengguna jasa

Perlunya dilaksanakannya sosialisasi mengenai aplikasi SIAP MUTU dan Sosiasisasi PMK Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 3 diberikan anggaran sebesar Rp.5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.0, kegiatan untuk merealisasikan IKU 3 belum dilaksanakan dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres No.01 Tahun 2025 diharapkan kegiatan ini dapat dilaksanakan di triwulan berikutnya .

IKU4. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan survailen penerapan Hazard Analysis Critical Control Points(HACCP). Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importer akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan . Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan kepada konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bemasalah atau tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Kendala tantangan dan rekomendasi saran dalam penanganan

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah tidak konsistennya pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 4 diberikan anggaran sebesar Rp.95.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.399.200,dikarenakan tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran dibeberapa kegiatan untuk merealisasikan IKU 4 sudah

cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai laboratprium diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 5 Capaian Target dan Realisasi IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium	Tidak ada IKU ini di tahun 2023	0	0	0	0	Tidak ada IKU ini di tahun 2023	Tidak ada IKU ini di tahun 2024	1	100

Data Dukung IKU 4

Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam
Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu Nomor : B.377/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2025. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan I Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 89,91 didapatkan dari 2 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 75, maka nilai realisasi sebesar 119,88%.

Kesimpulan: Untuk UPT SKIPM Batam belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata capaian Pusat Manajemen Mutu, dari data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam triwulan I Tahun 2025 sebesar 89,91.

Batam, 31 Maret 2025

Mengetahui,
Kepala SKIPM Batam
M. D. Mulyah Putra, S.PI., M.Si



Timja Manajemen Mutu
Firmando, S.ST.PI



IKU5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunda adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium. Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importer akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 5 diberikan anggaran sebesar Rp.25.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.500.000, kegiatan untuk merealisasikan IKU 5 sudah cukup baik dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai teknis diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 6 Capaian Target dan Realisasi IKU16 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Perse
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi	0	0	0	0	0	1	30	1	100

Data Dukung IKU 5

Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam

Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu Nomor : B.377/BPPMHKP.2/TU.140/IV/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Capaian Kinerja Sistem Manajemen Mutu Triwulan I Tahun 2025. Untuk UPT yang telah dilakukan penilaian pada Triwulan I Tahun 2025, menggunakan hasil penilaian masing-masing UPT. Sedangkan UPT yang belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu.

Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar 89,91 didapatkan dari 2 laboratorium (daftar seperti pada Lampiran 1). Berdasarkan perbandingan nilai realisasi dengan nilai target yaitu 75, maka nilai realisasi sebesar 119,88%.

Kesimpulan: Untuk UPT SKIPM Batam belum dilakukan penilaian maka nilai capaian menggunakan nilai capaian rata-rata capaian Pusat Manajemen Mutu, dari data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup UPT Stasiun KIPM Batam triwulan I Tahun 2025 sebesar 89,91.

Batam, 31 Maret 2025

Mengetahui,

Kepala SKIPM Batam



M. Dwi Widyah Putra, S.PI., M.Si

Timja Manajemen Mutu



Firmando, S.ST.PI

Sasaran Kinerja 3.1 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

IKU 6. Pelaksanaan Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup BKIPM didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER 4/PB/2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 6 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 6 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU nilai IKPA memiliki angka target 85 pada tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Target dan Realisasi IKU 6 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi untuk Triwulan I karena target dbuat di TW IV	Tidak ada realisasi untuk Triwulan I karena target dbuat di TW II	85	100

Data Dukung IKU 6



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

The screenshot shows a web application interface for budget performance monitoring. The title is "Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja". It includes a search bar, a table with columns for unit code, unit name, budget planning value, budget execution value, and performance value. The table shows one entry for the fish quarantine station with a planning value of 14.47 and an execution value of 37.98, resulting in a performance value of 56.23. Navigation buttons like "Download Excel", "Sebelumnya", and "Selanjutnya" are visible.

IKU 7. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPM Batam

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 7 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 7 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya.

Tabel 8 Capaian Target dan Realisasi IKU 7 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Perse
Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Stasiun KIPMBatam	86	0	0	0	0	Tidak ada realisasi untuk Triwulan I karena target dibuat di TW IV	Tidak ada realisasi untuk Triwulan I karena target dibuat di TW II	71	100

Data dukung IKU 7



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I BATAM

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Role: Prib TA (2025) Logout

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan: 1 dari 1 entri

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	882.23.427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	14,47	37,38	56,23

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

IKU8 . Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup SKIPM Batam

Dalam suatu instansi perlu adanya pemeriksaan secara menyeluruh guna untuk mengevaluasi kinerja Satker SKIPM Batam, untuk itu BPK(Badan Pemeriksa Keuangan)merupakan suatu instansi yang diberi tanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kinerja Satker BKIPM Batam dan BPK akan mengeluarkan nilai temuan LHP,

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan adalah merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kategori opini terhadap laporan keuangan kementerian/lembaga yang diberikan oleh BPK, yaitu:

Skala	Opini
5	WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
4	WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf
3	WDP : Wajar dengan pengecualian
2	Tidak Wajar
1	TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Ket: "Penilaian atas laporan keuangan merupakan hasil evaluasi dari laporan keuangan tahun sebelumnya"

untuk mengetahui jumlah realisasi/ persen capaian IKU ini dapat dilihat di tabel dibawah ini :

Tabel 9 Capaian Target dan Realisasi IKU 8 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2024			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT SKIPM Batam (%)	0	0	0	0	0	Target dan realisasi dilaksanakan d n d TW IV	Target dan realisasi dilaksanakan d TW IV	≤ 1	0

IKU9 . Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam

SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*), keahlian (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang

dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Pengembangan SDM BKIPM, menekankan manusia sebagai pelaku yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, loyalitas serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kemampuan manajemen. Hal ini harus terus dikembangkan baik secara kualitas maupun kuantitas guna keberhasilan pembangunan BKIPM. Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN SKIPM Batam pada tahun 2025 adalah TINGGI. Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU indeks profesionalitas ASN memiliki angka target pada tahun 2025 adalah 83 .

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 9 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 9 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian Target dan Realisasi IKU 9 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I			Realisasi TW I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Realisasi
Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada target untuk TW I karena dilaksanakan di TW II	Tidak ada target untuk TW I karena dilaksanakan di TW II	83	100

Monitoring Pengukuran Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

SKIPM Batam Tahun 2025

Semester 1 (Januari – Juni 2025) : 86,69 %

IP ASN 2025 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
16	BALAI KIP SEMARANG	29	23,28	83,12 %	30	75 %	25	83,33 %	5	100 %	83,28	TINGGI
17	BALAI KIP BANJARMASIN	14	21,43	85,72 %	32,71	81,77 %	25	83,33 %	5	100 %	84,14	TINGGI
18	BALAI KIP LAMPUNG	29	23,28	83,12 %	30,39	75,98 %	25,17	83,9 %	5	100 %	83,84	TINGGI
19	BALAI KIP AMBON	14	22,14	88,56 %	30,82	77,05 %	25	83,33 %	5	100 %	82,96	TINGGI
20	BALAI KIP ENTRIKONG	7	21,43	85,72 %	25,71	64,28 %	25	83,33 %	5	100 %	77,14	BEDANG
21	BALAI KIP TANJUNGPINANG	11	22,27	89,08 %	30,61	76,53 %	25	83,33 %	5	100 %	82,89	TINGGI
22	BALAI KIP TARAKAN	14	21,07	84,28 %	28,46	71,15 %	25	83,33 %	5	100 %	79,54	BEDANG
23	STASIUN KIP PALEMBANG	22	22,73	90,92 %	29,39	73,47 %	27,5	91,67 %	5	100 %	84,61	TINGGI
24	STASIUN KIP BANDAUNG	9	23,89	95,56 %	32,25	80,63 %	28,33	94,43 %	5	100 %	88,47	TINGGI
25	STASIUN KIP MERALAKE	13	20,77	83,08 %	32,15	80,38 %	25	83,33 %	5	100 %	82,92	TINGGI
26	STASIUN KIP PONTIANAK	17	22,85	90,6 %	29,4	73,5 %	22,06	73,53 %	4,76	95,2 %	78,87	BEDANG
27	STASIUN KIP KENDARI	13	21,54	86,16 %	31,4	78,5 %	25	83,33 %	5	100 %	82,94	TINGGI
28	STASIUN KIP BATAM	8	24,38	97,52 %	32,31	80,78 %	25	83,33 %	5	100 %	86,69	TINGGI
29	STASIUN KIP PADANG	13	22,31	89,24 %	30,23	75,58 %	25	83,33 %	5	100 %	82,54	TINGGI

IKU10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No.249/2011.

$$NK = (P \times Wp) + (K \times Wk) + (PK \times Wpk) + (E \times We)$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot

Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah

bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran

(WPK) =43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volumekeluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot

Efisiensi (WE) =28,6%)

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 10 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik hanya terkendala anggaran karena adanya efisiensi anggaran sesuai INPRES No.01 Tahun 2025 dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Realisasi target dilakukan pada akhir tahun saat penilaian. Data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Target dan Realisasi IKU10 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT SKIPM Batam (Nilai)	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi di di TRIWULAN I karena tidak ada target di TRIWULAN I	Tidak ada realisasi di di TRIWULAN I karena tidak ada target di TRIWULAN I	86	100

IKU11 . Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerjaLingkup SKIPM Batam

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada SKIPM Batam berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM BATAM yang menjadi objek pengawasan. Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Setiap instansi setelah melaksanakan review kinerja maka akan dikeluarkan temuan yang didapatkan selama proses review dilaksanakan untuk itu perlu adanya rekomendasi hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaiki kinerja lingkup satker. Pada triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100%.

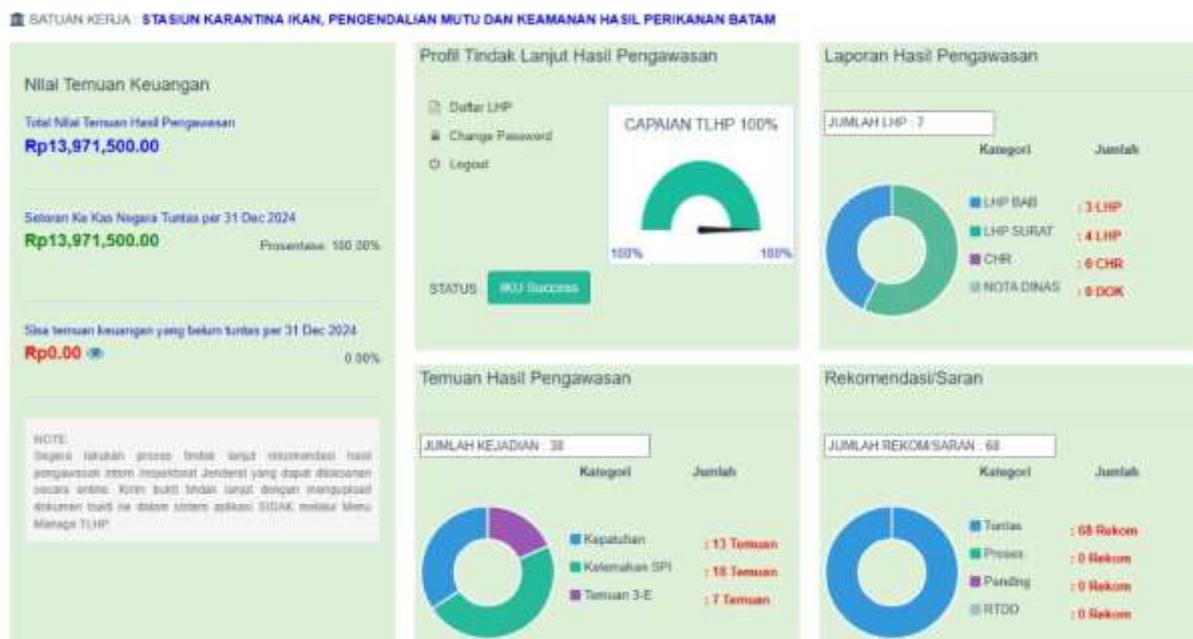
Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 11 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik hanya terkendala pengelola kegiatan dan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen,dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja capaian IKU ini dapat dilihat di table dibawah ini :

Tabel 12 Capaian Target dan Realisasi IKU11 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2020-2024	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LingkupSKIPM Batam	82	80	85	100	100%	82	98.53	75	100



IKU12. Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang Diumumkan Pada Sirup Lingkup SKIPM Batam

Untuk Tahun 2025 IKU untuk rencana umum pengadaan barang dan jasa ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan untuk pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan target yang terdapat di RKAKL. Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum.

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 12 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 10 sudah cukup baik, operator telah berhasil menginput data ke aplikasi SIRUP dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Perhitungan akan dilakukan di akhir tahun anggaran karena target kinerja ini bersifat triwulan. Keberhasilan capaian sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik mempunyai IKU persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja capaian IKU ini dapat dilihat di table dibawah ini :

Tabel 13 Capaian Target dan Realisasi IKU12 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Triwulan I 2025			Realisasi TRIWULAN I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persentase
Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada SIRUP	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi IKU ini di TRIWULAN I karena IKU baru dilaksanakan di 2025	Tidak ada realisasi IKU ini di TRIWULAN I karena IKU baru dilaksanakan di 2025	100	0

Data Dukung IKU 12

No	Satuan Kerja	Nama Paket	Pago (Rp.)	Metode Pembelian	Sumber Dana	Kode RUP	Waktu Pembelian
1	STASUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Biaya Meterai	120.000	Pengadaan Langsung	APBN	5557550	January 2025
2	STASUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.000.000	Penunjukan Langsung	APBN	5557551	January 2025
3	STASUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Puser	3.000.000	Pengadaan Langsung	APBN	5557560	January 2025
4	STASUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Langganan Internet	50.000.000	Pengadaan Langsung	APBN	5557563	January 2025
5	STASUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Langganan Google Drive	600.000	Pengadaan Langsung	APBN	5557564	January 2025
6	STASUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Perawatan Gedung Kantor	15.700.000	Pengadaan Langsung	APBN	58924789	January 2025

IKU13. Nilai Pembangunan Integritas SKIPM Batam

Untuk Tahun 2025 IKU untuk nilai pembangunan integritas lingkup SKIPM Batam ditambahkan sebagai indikator kinerja lingkup SKIPM Batam, hal ini dikarenakan integritas pegawai , telah menjadi perhatian dan perlu dievaluasi ,oleh karena itu untuk realisasi di tahun 2023 dan 2024 tidak terdapat realisasi dikarenakan IKU ini dilaksanakan di tahun 2025

Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Integritas adalah sikap yang wajib dimiliki oleh setiap orang untuk mencegah terjadinya korupsi. Nilai-nilai pembangunan integritas merujuk pada serangkaian prinsip moral dan etika yang menjadi dasar dalam membangun karakter individu maupun organisasi yang anti korupsi

dan berkualitas. Nilai-nilai ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 12 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 13 sudah cukup baik, seluruh pegawai SKIPM Batam telah melaksanakan nilai-nilai integritas dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Tabel 14 Capaian Target dan Realisasi IKU13 pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Target 2023	Triwulan I 2025			Realisasi TW I		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Perse n
Nilai pembangunan integritas SKIPM Batam	0	0	0	0	0	Tidak ada realisasi IKU ini di TRIWULAN I karena target dibuat di 2025	Tidak ada realisas IKU ini di TRIWULAN I karena target dibuat di 2025	100	0

IKU14. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT SKIPM Batam

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BKIPM adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikana oleh BKIPM dapat diterima oleh stakeholders kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Indikator indeks efetiitas kebijakan pemerintah merupakan indikator di Level 0 yang diturunkan ke seluruh level I dengan metode lingkup dipersempit. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai nilai Indeks persepsi kualitas pelayanan BKIPM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN lingkup SKIPM BATAM antara lain melibatkan stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan, sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholder di daerah, menyusun policy brief atas pelayanan yang telah diambil dan mengevaluasi kualitas pelayanan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut, survei peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Disamping itu, telah digunakannya fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi stakeholder. Sehingga dari hasil evaluasi, diharapkan terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai fokus perbaikan kualitas pelayanan publik, diantaranya:

- a. Melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam proses penyusunan Standar Pelayanan
- b. Menindaklanjuti hasil SKM seluruhnya secara lebih cepat.
- c. Menyediakan ruang khusus untuk layanan konsultasi dan pengaduan tatap muka.
- d. Memperluas media dokumentasi hasil konsultasi dan penanganan pengaduan, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- e. Meningkatkan pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik menjadi bulanan

- f. Mempertimbangkan alokasi anggaran untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan
- g. Memonitoring pelaksanaan e-service agar berkelanjutan dan mengikutsertakan pada kompetisi inovasi

Evaluasi dan analisis capaian kinerja

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Batam selaku salah satu unit instansi pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan publik tentu tidak dapat terlepas tuntutan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan publik. Selain itu, salah satu persyaratan ISO 9001 : 2015, SNI ISO/IEC 17020 : 2012 dan SNI ISO/IEC 17025 : 2017 juga mempersyaratkan akan pentingnya umpan balik pelanggan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Unsur Survey Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM) masyarakat/pengguna jasa dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM.

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Tahunan tahun 2025 Stasiun KIPM Batam bernilai 99.04 dengan kategori **sangat baik**. Nilai survey ini diperoleh dari 53 responden pelaku usaha perikanan pengguna layanan Stasiun KIPM Batam dari 9 unsur pertanyaan dengan nilai rata-rata per unsur sebagai berikut : persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan jenis pelayanan, sistem, mekanisme, prosedur, waktu penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan, biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, serta fasilitas pelayanan.

Efisiensi Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya

Untuk IKU 14 diberikan anggaran sebesar Rp. 7.777.472.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.758.931.787, kegiatan untuk merealisasikan IKU 14 sudah baik, dengan pembekalan yang diberikan kepada pegawai diharapkan kegiatan ini dapat ditingkatkan di triwulan berikutnya

Tabel 15 Capaian Target dan Realisasi IKU 14 pada Tahunan Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Target 2024	Tahunan 2025			Realisasi Tahunan		Renstra 2024-2029	
			Target	Realisasi	%	2023	2024	Target	Persen
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publikdi UPT SKIPM Batam	0	0	88	99.04	100%	91.88	0	3.62	0

Data Dukung IKU 14

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.1856/BPPMHKP.1/KI.120/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

Rekapitulasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan lingkup BPPMHKP Triwulan I Tahun 2025

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai

REALISASI ANGGARAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Batam pada Triwulan I anggaran (T.A) 2024 adalah **Rp.8.226.812.000-**. dengan jumlah blokir **Rp.1.632.243.000** karena adanya **INPRES 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran** .Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Batam sebesar **Rp. 1.294.319.000** atau sebesar **15.73 %** dari keseluruhan pagu anggaran. Rekapitulasi penyerapan anggaran SKIPM Batam T.A 2025 Triwulan I berdasarkan jenis kegiatan disajikan pada Tabel berikut :

Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan I TA. 2025

No.	Kode/Kegiatan	Pagu	Realisasi TRIWULAN I	%
1	3987/Dukungan Manajemen	7,776,812,000	1,274,779,873	16.39%
3	3989/Pengendalian Mutu	270,000,000	7,640,000	2.83%
4	7010/Manajemen Mutu	180,000,000	11,899,200	6.61%
	TOTAL	8,226,812,000	1,294,319,073	15.73%

Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan I TA. 2025

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi TRIWULAN I	%
1	Belanja Pegawai	3,906,920,000,-	697,498,597,-	17.85
2	Belanja Barang	4,319,892,000,-	596,820,476,-	13.82
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0
	TOTAL	8.226.812.000,-	1,294,319,073,-	15.73

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan I tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

REKOMENDASI

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun KIPM Batam Triwulan I Tahun 2025 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun KIPM Batam sudah baik dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar 113.63 % pada aplikasi kinerja dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya:

1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada tahun 2025 sehingga dapat meningkatkan percepatan target kinerja di Triwulan II 2025
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2025 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan triwulan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2025, secara umum kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Batam pada Triwulan I telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rekomendasi yang perlu dilakukan adalah terus meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian indikator kinerja Stasiun KIPM Batam, sehingga dapat tercapai yang maksimal.



STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASILPERIKANAN BATAM

JL. M NAHAR – BELIAN – BATAM

LAMPIRAN-LAMPIRAN